

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia merupakan proses perubahan yang berawal dari situasi tertentu untuk mencapai kondisi nasional ke arah yang lebih baik. Proses pembangunan dapat dimulai dari unit terkecil dalam negara yaitu desa. Metode untuk meningkatkan pembangunan pada tingkat desa adalah dengan memberikan pemerintah desa kewenangan dalam mengelola sektor desa secara mandiri melalui lembaga ekonomi tingkat desa (Budiono, 2015). Organisasi yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pembangunan di Indonesia yang dicanangkan dari desa dinilai efektif dalam mendukung pembangunan nasional di Indonesia. BUMDes sebagai pilar pembangunan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi bidang ekonomi (Zaenuri *et al.*, 2019). BUMDes berperan penting dalam mendorong potensi desa membantu upaya penurunan tingkat kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk menginvestigasi kinerja keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Desa memiliki fungsi yang krusial dalam usaha pembangunan nasional, karena masyarakat Indonesia cenderung tinggal di wilayah pedesaan sehingga hal tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dan

signifikan terhadap upaya penciptaan stabilitas nasional (Sa'dullah, 2016). Dalam perspektif hubungan perdesaan dengan perkotaan, prinsip yang paling penting adalah mendayagunakan sumber daya ekonomi desa dan mengedepankan aktivitas ekonomi secara maksimal di desa melalui peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah (Qosjim, 2017). Desa memiliki potensi yang besar dari segi jumlah penduduk serta sumber daya alam yang melimpah. Jika dikelola secara optimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa.

Dasar pembentukan BUMDes berkaitan dengan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan gagasan masyarakat serta sebagai upaya pemerintah desa untuk mendorong kemajuan ekonomi desa. Pendirian BUMDes sebagai salah satu pilar pembangunan desa yang diharapkan dapat mewujudkan desa mandiri yang percaya diri serta berhasil mengatur rumah tangganya sendiri sehingga desa tidak hanya bergantung kepada anggaran dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat serta sebagai bentuk motivasi untuk membentuk sebuah kemajuan di dalam kehidupan penduduk desa (Qosjim, 2017).

Badan Usaha Milik Desa disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, adalah usaha desa yang didirikan oleh pemerintah desa dengan menggunakan kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan warga. Tujuan utama pendirian BUMDes yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ridlwan,

2017). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan kepentingan masyarakat melalui partisipasinya dalam penyediaan pelayanan sosial. BUMDes sebagai instrumen modal sosial diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan desa dengan lingkup perekonomian luar sehingga menjadi penguat ekonomi pedesaan (Ridlwan, 2014).

Pendirian BUMDes merupakan sarana untuk membangun ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Hardjono *et al.*, 2014). Berkaitan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas inisiasi masyarakat, serta berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel dan *sustainable*, yang terpenting adalah pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri (Ridlwan, 2014). Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes diharapkan sanggup memaksimalkan potensi masyarakat desa dari aspek ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia (Laru & Suprojo, 2019). Dalam menjalankan suatu usaha keimanan menjadikan seseorang merasa optimis, naik turunnya keuntungan yang telah di dapatkan harus senantiasa sabar dalam menerima hasilnya karena Allah SWT telah mengatur rezeki tiap manusia.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Q.S. Al Hud ayat 6:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝

“Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata”

Dorongan dari pemerintah mengakibatkan pertumbuhan jumlah BUMDes terus bertambah setiap tahunnya. Namun dalam perkembangannya, fenomena yang terjadi saat ini banyak BUMDes yang belum menerapkan sistem kinerja berkelanjutan dalam menjalankan usahanya. Perkembangan ekonomi dalam kelembagaan ini kebanyakan mengutamakan pada peningkatan laba dan pengoptimalan sumber daya untuk penggunaan seefektif mungkin. Hal ini mengakibatkan pengelola mengabaikan aspek – aspek lingkungan dan sosial serta tata kelola. Pengembangan BUMDes perlu dilakukan agar BUMDes yang telah berdiri dapat berfungsi sesuai dengan peranannya (Agunggunanto *et al.*, 2016). Evaluasi terkait masalah ini dapat mendorong pengelola untuk mengharapkan adanya pengungkapan informasi non-keuangan, yaitu pengungkapan terkait dengan seluruh indikator *sustainability performance*. Indikator utama yang dapat dijadikan acuan mengenai kriteria *sustainability performance* yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Konsep *sustainability* menjadi hal penting karena untuk mencapai tingkat kesejahteraan tertentu dibutuhkan usaha yang terus-menerus atau berlanjut dengan skala yang berimbang dan proporsional. Agar keberlanjutan menjadi bermakna maka harus merujuk pada

mempertahankan, memperbaharui atau memulihkan sesuatu yang lebih spesifik, termasuk pada perubahan antara tekanan ekonomi saat ini dan kebutuhan masa depan (Wilkinson, Hill & Golam, 2001). Konsep dari laporan keberlanjutan berfokus tidak hanya dari segi keuntungan, tetapi juga kepada bisnis jangka panjang yang dapat berpengaruh pada kinerja suatu organisasi. Keberlanjutan tidak berfokus hanya pada kepentingan investor dan pemegang saham, tetapi juga pada tanggung jawab pemangku kepentingan baik secara langsung maupun terpengaruh secara tidak langsung yang terkait dengan bisnis (Caesaria & Basuki, 2016). Perubahan besar dalam perkembangan dunia usaha, isu keberlanjutan merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan secara serius oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes.

Keberlanjutan (*sustainability*) menjadi isu yang menjadi perhatian bagi perusahaan di seluruh dunia sejak pertama kali diperkenalkan oleh *Brundtland Commission* pada tahun 1987, hal ini memicu lahirnya gagasan baru mengenai konsep pembangunan ekonomi dan keterkaitannya dengan aspek lingkungan dan sosial (Fandeli, Hasan & Amrina, 2020). Sama halnya dengan keberlanjutan pada BUMDes, hal ini akan menciptakan dan mempertahankan kondisi dimana masyarakat dan alam ada dalam keselarasan yang produktif. Keberlanjutan kinerja pada BUMDes penting untuk memastikan bahwa BUMDes tersebut berjalan lancar dalam mengelola potensi yang ada dalam desa. Pada akhirnya, masa depan suatu

BUMDes bergantung pada bagaimana pengelola meningkatkan kinerja organisasi menuju keberlanjutan.

Setiap BUMDes memiliki unit usaha unggulan yang diandalkan pada masing masing daerah. Industri ekonomi BUMDes dianggap sebagai salah satu industri dengan pertumbuhan tercepat, mulai dari organisasi bisnis hingga organisasi politik. Hal ini dikarenakan dengan adanya pembangunan, tenaga kerja dalam masyarakat dapat terserap untuk membangun infrastruktur yang mengakibatkan fasilitas untuk masyarakat terpenuhi yang dapat menyebabkan meningkatnya akses mobilitas, informasi, aktivitas ekonomi dan kesejahteraan (Sanjaya *et.al*, 2022). Pembangunan berkelanjutan yang utama adalah pengembangan masyarakat lokal, definisi pembangunan berkelanjutan di organisasi berbasis ekonomi telah banyak digunakan, kebijakan dan tindakan telah dilakukan untuk menyeimbangkan biaya dan manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan (Tseng *et al.*, 2018). Konsep yang diusulkan ini berfungsi sebagai indikator kinerja inti untuk mengukur keberlanjutan.

Pengukuran *sustainability performance* pada BUMDes membantu pengelola dalam menyusun rencana jangka panjang organisasinya. Organisasi percaya bahwa menerapkan kinerja berkelanjutan dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan strategis manajemen suatu organisasi (Fauzi *et al.*, 2021). Kinerja keberlanjutan diperlukan dalam mengevaluasi kelemahan serta peluang pada BUMDes di era persaingan yang semakin kompetitif, serta membantu pada mengoptimalkan penggunaan dana desa

yang berasal dari pemerintah. Dampak dari penerapan kinerja keberlanjutan BUMDes juga membantu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Ada juga kekhawatiran yang berkembang dengan keberlanjutan, dampak organisasi kegiatan pada lingkungan dan masyarakat serta aspek yang lebih tradisional dari kelayakan ekonomi (Adams *et al.*, 2014). Saat ini pemerintah sedang berusaha pada tahap pemulihan dari pandemi sehingga sektor usaha yang dikelola oleh BUMDes yang sebelumnya tutup atau rugi akibat efek pandemic dapat berjalan lagi seperti sedia kala.

Pertanyaan yang mendasari pelaporan keberlanjutan adalah bagaimana sebuah perusahaan berkontribusi atau bertujuan untuk memberikan kontribusi di masa mendatang, terhadap peningkatan atau penurunan kondisi, pengembangan, dan tren ekonomi, lingkungan, serta sosial di tingkat lokal, regional, atau global. Laporan keberlanjutan semakin populer dipublikasikan oleh perusahaan sebagai alat komunikasi perusahaan dalam mengungkapkan bagaimana kontribusi pembangunan keberlanjutan (Cantele *et al.*, 2018). Untuk menginvestigasi tingkat pengungkapan informasi keberlanjutan oleh BUMDes, penelitian ini menggunakan beberapa aspek penilaian terhadap item-item yang dilaporkan oleh BUMDes. Pengungkapan mengacu pada kesesuaian indikator-indikator dalam pedoman GRI untuk diterapkan dalam konteks kinerja keberlanjutan di Indonesia terutama pada BUMDes.

Penelitian ini menginvestasi lebih dalam mengenai penerapan serta pengungkapan *sustainability performance* pada BUMDes di Daerah

Istimewa Yogyakarta. Pasalnya, tidak semua BUMDes yang telah dibentuk dapat berjalan dengan baik, dari 3.900 BUMDes yang ada, hanya sebagian kecil yang menunjukkan kinerja yang memuaskan (Sofyani, Ali, & Septiarini, 2018). Indikator *sustainable performance* dapat memberikan nilai tambah yang signifikan untuk komunikasi korporat non-keuangan, dan merupakan alat yang berguna untuk mendukung proses pengambilan keputusan internal. Pedoman GRI selalu mengaitkan peran sentral dengan penggunaan indikator ekonomi, lingkungan, dan sosial yang terintegrasi untuk mewakili kinerja berkelanjutan perusahaan (Raucci & Tarquino, 2020).

Penelitian sebelumnya oleh Raucci & Tarquino (2020) meneliti tentang pengungkapan dan penerapan indikator *sustainability performance* pada perusahaan non-profit di Italia dalam serta pengaruhnya dalam pengambilan keputusan. Raucci & Taurqino (2020) mengungkapkan bahwa indikator *sustainabilty performance* berguna untuk mendukung proses pengambilan keputusan internal dan untuk mengontrol kinerja organisasi. Penelitian terkait dengan “Potret Sustainability Perfomance pada BUMDes di Daerah Istimewa Yogyakarta” bertujuan untuk menginvestigasi dan melihat bagaimana mengungkapkan penerapan indikator *sustainability performance* oleh Badan Usaha Milik Desa dalam pengambilan keputusan serta perkembangan berkelanjutan. Berdasarkan prespektif peneliti apakah BUMDes tersebut telah menerapkan keberlanjutan sehingga bisa berkembang dan bertahan di era perubahan kedepannya. Penelitian ini

berpedoman pada Pedoman Pelaporan Keberlanjutan GRI (*Global Reporting Initiative*) atau G4. Pengelolaan BUMDes yang menganut prinsip tata kelola yang baik serta didukung oleh aspek kepemimpinan, aspek sosial budaya, dan aspek lingkungan daerah setempat menjadi faktor keberhasilan BUMDes (Arindhawati & Utami, 2020). Kesadaran dalam menerapkan keberlanjutan menjadi hal utama yang harus disadari oleh pengelola agar BUMDes dapat secara maksimal memberikan manfaat bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti diatas, adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apa saja aspek *sustainability performance* yang diterapkan di BUMDes?
2. Bagaimana penerapan *sustainability performance* di Badan Usaha Milik Desa dalam pada Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana kendala dalam penerapan *sustainability performance* di BUMDes?
4. Bagaimana solusi menghadapi kendala penerapan *sustainability performance* di BUMDes?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi aspek *sustainability performance* yang diterapkan di BUMDes.

2. Untuk menginvestigasi penerapan aspek *sustainability performance* di BUMDes.
3. Untuk menginvestigasi kendala dalam penerapan *sustainability performance* di BUMDes.
4. Untuk memberikan rekomendasi dalam kendala penerapan *sustainability performance* di BUMDes.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan mengenai *sustainability performance* BUMDes dalam pengembangan unit usahanya. Pemahaman *sustainability performance* diperlukan dalam pengelolaan BUMDes pada suatu daerah untuk menunjang perkembangan BUMDes agar dapat terus bertahan dalam menjalankan usahanya. Membantu BUMDes dalam menyadari pentingnya penerapan keberlanjutan bagi keberlangsungan usahanya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengelola BUMDes sebagai bahan pertimbangan kebijakan untuk mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan unit usaha sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Mengoptimalkan peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat dan potensi desa.